



Media: BERNAS

Hari: Senin

Tanggal: 06 Februari 2017

Halaman: 9

Pelanggaran Pilkada Semakin Kecil

JOGJA, BERNAS -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini belum menemukan tindakan pelanggaran pidana dalam tahapan Pilkada 2017 di Kota Yogyakarta maupun Kulonprogo.

"Sampai sekarang baik di Kota Yogyakarta maupun Kulonprogo

belum ada pelanggaran kategori pidana," kata Muhammad Najib, Bawaslu DIY, Sabtu (4/2).

Menurut Najib, sejak tahapan kampanye pada Oktober hingga penetapan daftar pemilih tetap (DPT) hanya ada pelanggaran yang bersifat administratif seperti pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Najib menilai rendahnya tingkat pelanggaran itu juga bisa disebabkan minimnya minat tim sukses atau pasangan calon bupati atau walikota menggunakan tahapan kampanye rapat umum atau pertemuan terbatas. "Baik kampanye rapat umum maupun tatap muka atau terbatas seperti ini atau kurang ber-

gairah, sehingga potensi pelanggaran semakin kecil," kata dia.

Meski demikian, menurut dia, peluang potensi pelanggaran pidana pemilu masih tetap ada hingga masa Pilkada berakhir, khususnya saat pemungutan dan penghitungan suara pada 15 Februari 2017.

Pada tahap penghitungan dan

penghitungan suara, menurut Najib, kasus pidana pemilu yang berpotensi muncul, antara lain, penghilangan hak suara pemilih, memilih lebih dari satu kali, serta politik uang.

"Di level ini pelanggaran pidana pemilu bisa melibatkan banyak pihak mulai penyelenggara pemilu, pemilih, tim kampanye hingga su-

karelawan," kata dia.

Komisioner Bawaslu DIY Bagus Sarwono mengakui hingga saat ini memang belum ada bentuk pelanggaran pemilu dari masing-masing calon, kecuali pelanggaran pemasangan APK.

Menurut Bagus, selama masa

► ke hal 15

Pelanggaran Pilkada

kampanye yang dimulai sejak 28 Oktober pelanggaran pemasangan APK paling mendominasi baik dilakukan pasangan calon nomor urut satu atau dua di Kota Yogyakarta maupun Kulonprogo.

Pelanggaran pemasangan APK di Kulonprogo periode 3-9 Desember 2016, menurut dia, terjadi di 86 titik pemasangan APK yakni di Kecamatan Panjatan, Wates, dan Lendah yang terdiri atas 78 APK rontek, dan 8 APK bendera. Sedangkan di Kota Yogyakarta pelanggaran APK 54 titik pemasangan APK di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Gondokusuman.

Sementara itu Komandan Korem 072/Pamungkas Brigjen TNI Fajar Setiawan menegaskan TNI netral dalam pemilihan kepala daerah serentak yang akan berlangsung di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo.

"Netralitas TNI harga mati. Jika mengetahui ada yang tidak netral tolong laporkan kepada kami," kata Fajar Setiawan di Kepatihan, Jumat (3/2).

Menurut Fajar, Korem 072/Pamungkas siap memberikan sanksi berat hingga pemecatan bagi personel TNI yang terbukti tidak netral dalam perhelatan Pilkada 2017. "Kalau dalam

persidangan terbukti sah tidak netral kami siap memberikan sanksi terberat," kata dia.

Namun demikian, ia meyakini seluruh anggota TNI di DIY memiliki kesadaran penuh terkait posisi TNI serta risiko yang akan didapatkan jika melanggar prinsip netralitas dalam Pilkada.

"Alhamdulillah selama saya di Yogyakarta, belum pernah ada kasus TNI tidak netral," kata dia.

Sebaliknya, menurut dia, jajaran perajurit TNI di wilayah Korem 072/Pamungkas justru siap mengawal dan mengamankan penyelenggaraan Pilkada hingga tahap pemungutan dan penghitungan suara

Sambungan dari halaman 9
dengan berkoordinasi bersama Polda DIY.

"Dalam pengamanan Pilkada kami bersifat *mem-back up* Pold sehingga kapan pun kami diminta bantuan kami siap dengan personel serta sumber daya lain yang kami miliki," kata dia.

Untuk mengantisipasi potensi konflik saat momentum pemungutan suara, ia juga telah menerjunkan bintang pembina desa (babinsa) yang bertugas melakukan pendekatan kepada masyarakat sebagai upaya meminimalisasi potensi konflik menjelang Pilkada. "Babinsa jelas kami libatkan sebagai langkah preventif," kata dia. (ant)

4

☐ Netral

☐ Biasa

☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005